



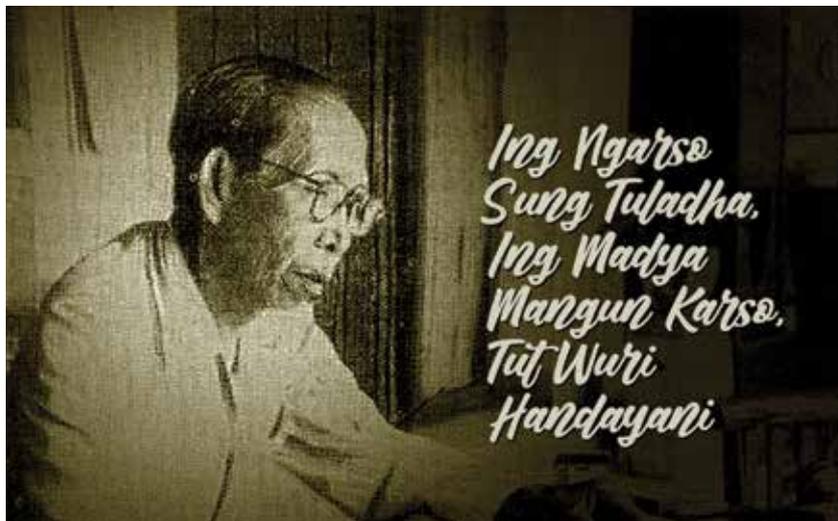
Cirebon Katon

Berita & Informasi Wakil Rakyat



Tata Ulang Ruang Cirebon

Tut Wuri Handayani



Memasuki bulan Mei sebuah peristiwa penting tercatat: Hari Pendidikan Nasional yang ditengarai sejak Ki Hajar Dewantoro melakukan upaya pergerakan pengetahuan. Tahun 1928 tepatnya pada bulan Mei, Ki Hajar mendirikan sebuah wadah untuk membina para rakyat Indonesia.

Sejarah Hari Pendidikan Nasional memang tak bisa dilepaskan dari sosok dan perjuangan Ki Hadjar Dewantara, sang pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan.

Ki Hadjar dikenal karena berani menentang kebijakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda pada masa itu, yang hanya memperbolehkan anak-anak kelahiran Belanda atau golongan kaya mengenyam bangku pendidikan.

Kritiknya terhadap kebijakan pemerintah kolonial menyebabkan Ki Hajar diasingkan ke Belanda. Ia pun mendirikan sebuah lembaga pendidikan bernama *Nationaal Onderwijs Instituut Ta-*

mansiswa atau Perguruan Nasional Tamansiswa setelah kembali ke Indonesia.

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, Ki Hajar, diangkat menjadi Menteri Pendidikan pertama. Ia pun menginisiasi terciptanya filosofi *Tut Wuri Handayani* yang bermakna (di belakang memberi dorongan) dan akhirnya digunakan semboyan pendidikan hingga saat ini.

Tepat edisi kali ini, kita bersama-sama memperingati hari pendidikan nasional tahun 2023. Sejalan dengan semboyan *Tut Wuri Handayani*, kami redaksi majalah Cirebon Katon berharap demikian. Di belakang layar turut mendorong perubahan dengan menyajikan informasi terkini seputar Pemerintah Kabupaten Cirebon dan legislator.

Kami sajikan rencana perubahan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon. Semoga dapat memberi pengetahuan bagi segenap pembaca budiman. Selamat membaca Cirebon Katon!

PEMBINA/PENASEHAT :

H. Mohamad Luthfi, ST, M.Si
(Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Rudiana, SE
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Teguh Rusiana Merdeka, SH
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Drs. H. Subhan, S.E.
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

PENGARAH :

Hj Eriati
(Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kab. Cirebon)

Munawir, SH.
(Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kab. Cirebon)

H. Sofwan, S.T
(Ketua Komisi 1)

R. Hasan Basori
(Ketua Komisi 2)

Anton Maulana, S.T, M.M
(Ketua Komisi 3)

Aan Setiawan, S.Si
(Ketua Komisi 4)

PIMPINAN UMUM/PIMPINAN REDAKSI :

Asep Pamungkas, SP, MP
(Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI :

drh. Encus Suswaningsih M.Si
(Kabag Humas Protokol, Kerjasama dan Aspirasi)

Isnaeni Jazilah, S.H, M.H
(Kabag Persidangan dan Perundang-undangan)

REDAKTUR PELAKSANA :

Dra. Puti Amanah Sari
(Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda)

REDAKSI AHLI :

S. Yudi

REDAKTUR :

Yusuf

REPORTER :

• Riyan • Amir

FOTOGRAFER :

Qusoy

DESAIN GRAFIS :

Boyke Datu

DATA DAN RISET :

Oman

DISTRIBUSI :

Firman • Misbah

KORESPONDENSI:

redaksi.cika@gmail.com

PENERBIT :

Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber Cirebon

• Telp. 0231 32150 • Kode Pos 45611



04 | FOKUS
Susun Ulang Tata Ruang

6 | Revisi Perda RTRW
Komisi III: Prioritaskan Zona Hijau



14 | KILAS
Apresiasi Program Polisi RW



18 | PUBLIKA
Mohon Perbaiki Tanggul Rusak



22 | LENSAS
Di Tangan Ondi, Ban Bekas Jadi Kreativitas



24 | PROFIL
Marsaid Budi Riyanto
Setiap Kamis, Wajibkan Bebasan Carbon

28 | DINAMIKA
Komisi III: Segera Atasi Kemacetan Jalan
Kedawang-Warungasem

30 | Evaluasi Penggunaan Dana Desa

32 | Jelang Pilwu 2023
Desa Harus Bereskan Aset dan LKPJ

34 | Pastikan PPDB 2023 Sesuai Aturan



36 | POTENSI
Wanawisata Ciwaringin
Perlu Sentuhan Agar Dilirik Wisatawan



38 | DESA
Pakusamben
Didapuk Jadi Smart Village

Susun Ulang Tata Ruang

Dinilai usang, Pemkab Cirebon ajukan perubahan Perda RTRW dan telah masuk propemperda 2023. Apa urgensinya?



Foto: foto: quip/dk

Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengatur penataan ruang dalam suatu wilayah.

Penataan ruang menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat yang mengatur perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Sebagaimana amanat UU, pemerintah diharuskan membaca dan menganalisa struktur dan pola serta potensi sumber daya alam yang tersedia di sebuah kota. Juga aspek administratif dan aspek fungsional yang bertujuan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional dan lokal. Tata ruang erat kaitannya dengan peren-

canaan yang berfungsi untuk melihat struktur ruang pada kota.

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2018 Kabupaten Cirebon tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjelaskan, fungsi tata ruang untuk mewujudkan ruang wilayah di Kabupaten Cirebon yang aman, nyaman, produktif, terpadu sebagai sentra pertanian, industri, serta pariwisata.

Perda RTRW memiliki masa waktu dua puluh tahun. Dalam perjalanannya, perda ini mengalami revisi beberapa kali. Sebelumnya pada 2018 silam, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menyepakati perubahan Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang RTRW.

Perubahan pertama disebabkan, terbitnya peraturan baru di tingkat nasional sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang. Maka untuk menghindari terjadinya ketidakpastian dalam perundang-undangan, dilakukanlah penyesuaian dan menelurkan Perda RTRW Nomor 7 tahun 2018.

Dalam Perda Nomor 7 tahun 2018, setidaknya mencakup enam pembahasan. Pertama, ruang lingkup wilayah Kabupaten Cirebon berdasarkan aspek administratif dengan luas daratan 107.028 hektare, dan pesisir sepanjang 77.97 kilometer.

Sementara batas wilayah administrasi Kabupaten Cirebon meliputi; utara berbatasan Kabupaten Indramayu dan laut Jawa, selatan berbatasan Kabupaten Kuningan, barat berbatasan Kabupaten Majalengka, timur berbatasan Kota Cirebon dan Kabupaten Brebes.

Kedua, RTRW juga menjelaskan struktur ruang permukiman dan kegiatan ekonomi. Ketiga pola ruang wilayah kabupaten,

yang memiliki pengertian distribusi ruang untuk fungsi lindung dan budidaya.

Selanjutnya, perda juga mengatur penetapan kawasan strategis kabupaten (KSK) dan kawasan strategis provinsi (KSP). Kelima, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Terakhir, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Kepala Bidang (Kabid) Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Cirebon Dadang Ju-naedi mengatakan, Perda RTRW merupakan perda komando dalam sektor pembangunan.

“Perda RTRW ini memiliki urgensi yang sangat penting karena komando segala pembangunan di Cirebon. Sehingga harus selaras dengan regulasi pemerintah pusat dengan melihat perkembangan wilayah,” ujarnya.

Secara regulasi Perda RTRW berlaku 20 tahun. Namun bukan

berarti tak dapat direvisi. Perda RTRW dapat ditinjau kembali guna menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi.

“Secara aturan, UU Penataan Ruang No 26 Tahun 2007, dan UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 mengisyaratkan Perda RTRW berdimensi 20 tahun. Tapi maksimal 5 tahun sekali haru direvisi dengan alasan-alasan tertentu,” jelas Dadang.

Pada Maret 2021, Pemerintah Kabupaten Cirebon pun telah mengajukan peninjauan ulang terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2018 agar dapat direvisi. Dan telah masuk dalam program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2023.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon, terdapat perubahan jumlah wilayah, capaian kesehatan, pemukiman, industri dan pertanian. Sehingga hal itu menjadi alasan perda akan disusun ulang. •Par



Revisi Perda RTRW

Komisi III: Prioritaskan Zona Hijau

Komisi III meminta agar perubahan perda RTRW lebih selektif dan berhati-hati dengan tidak merusak zona hijau



Foto: foto: quoy/dk

Rancangan perubahan Peraturan Daerah Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 telah diajukan peninjauan sejak tahun 2021.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Cirebon melaporkan telah melaksanakan pleno keputusan sejak Maret 2021.

“Kami sudah mengajukan peninjauan kembali, sekaligus menyusun materi teknis dan mengadakan pleno pertama revisi perda,” ujar Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Cirebon Dadang Junaedi.

Meski sempat terhenti selama 10 bulan karena penyesuaian akibat terbitnya peraturan baru Kementerian Agraria dan Tata Ruang, namun rencana perubahan RTRW akhirnya dapat dihantarkan pada akhir 2022.

“Rapat pleno terakhir sudah kami lakukan tahun

2022, saat itu dari provinsi juga hadir. Lalu di awal tahun 2023 kami juga rapat virtual bersama Pokja Kementerian PUPR terkait substansi persiapan,” ungkapnya.

Dadang mengungkapkan, empat alasan yang mendasari Perda RTRW perlu segera direvisi. Pertama, terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. “Pada undang-undang itu jelas, rencana tata ruang wilayah kabupaten harus ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun,” ungkap Dadang.

Kedua, lahirnya kebijakan-kebijakan baru seperti Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Ruang Wilayah, Peraturan Kementerian PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur.

Dadang menilai, kedua kebijakan tersebut, memberi pengaruh pada sektor pembangunan secara sig-



nifikan bagi Kabupaten Cirebon. Maka, agar kebijakan daerah, provinsi dan pusat dalam tata ruang bisa selaras perlu dilakukan revisi.

Ketiga, alasan batas wilayah Kabupaten Cirebon dan beberapa kebijakan yang belum masuk ke dalam perda RTRW Kabupaten Cirebon.

Seperti diketahui, batas wilayah antara Kabupaten Cirebon dengan Kota Cirebon sempat menjadi polemik. Terutama berkaitan pelayanan publik di area perbatasan.

Terakhir, berkenaan proyek mercusuar seperti pembangunan

jalan lingkar, dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang belum diwadahi oleh perda RTRW.

Jalan lingkar yang dimaksud mengenai jalan alternatif yang berguna untuk mengurangi kemacetan. Sementara LP2B adalah, lahan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian suatu wilayah.

“Makanya, perda tersebut harus dipastikan sesuai dengan perkembangan wilayah yang ada,” jelas Dadang.

Menanggapi itu, Wakil Ke-

tua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Yoga Setiawan mendukung langkah pemerintah daerah meninjau ulang Perda Nomor 7 Tahun 2018.

Senada, Yoga menilai, tata ruang Kabupaten Cirebon belum sejalan dengan aturan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Pada dasarnya kami mendukung dengan rencana revisi ini. Dengan harapan ke depan antara kementerian ATR/BPN dengan Dinas PUPR kita bisa memiliki regulasi yang selaras,” jelasnya.

Namun, Yoga mengingatkan agar pemkab bisa selektif dalam menyusun materi, salah satunya memastikan zona hijau harus tetap terjaga.

Zona hijau ini meliputi kawasan yang dilindungi seperti pertanian, dan perkebunan. Berdasarkan perda RTRW tahun 2018, ada 45.000 hektare yang masuk lahan pertanian.

“Jangan sampai zona hijau tidak terjaga karena berkaitan cadangan pangan berkelanjutan,” tegasnya.

Dia menegaskan, pemkab harus teliti dan selektif karena menentukan nasib Kabupaten Cirebon untuk 20 tahun ke depan.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Anton Maulana meminta agar Bupati Cirebon dapat menjelaskan potensi alih fungsi lahan persawahan, pemukiman dan industri. Agar tidak terjadi dampak buruk bagi Kabupaten Cirebon.

“Ini penting diingatkan, karena berkaitan ketahanan pangan, penguasaan lahan dan kepastian zona hijau. Dan yang penting harus jelas revisi perda ini,” kata Anton. •Par

PUPR: Sektor Pembangunan dan Operasional Merugi Bila tak Segera Revisi

Ada dampak kerugian bila perda tata ruang tak segera direvisi. Anton ingatkan, tata ruang harus menjawab semua sektor tetap hidup. Seperti apa?



Foto: foto: mih/qusoy/dk

Kepala Bidang (Kabid) Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Cirebon Dadang Junaedi menyebut, ada dua dampak bila peraturan daerah rencana tata ruang wilayah (RTRW) tak segera direvisi. Pertama sektor infrastruktur berkaitan tata ruang yang kurang tepat. Kedua, tak tercapainya pemenuhan operasional pembangunan.

Dadang mencontohkan, ketika zona Lahan Sawah Dilindungi (LSD) namun justru dibangun pabrik atau permukiman tentu akan merugikan karena menimbulkan limbah. Penyebabnya, karena belum masuknya Permendagri tentang LSD ke perda.

“Permendagri baru tentang LSD yang belum diwadhahi perda membahas soal alih fungsi lahan sawah.

Kalau gak direvisi ya nanti sawah produktif bisa diubah jadi industri atau perumahan,” jelas Dadang.

Dampak selanjutnya, carut-marutnya pemenuhan operasional pembangunan. Dadang menjelaskan, operasional pembangunan meliputi penetapan kebutuhan pembangunan. Mulai dari penyaluran anggaran sampai material yang dibutuhkan. Operasional yang tak terkonsep dengan baik, akan mempengaruhi hasil.

Ia pun mengaku, dalam proses penyusunan materi peninjauan kembali perda RTRW, telah melakukan konsultasi publik agar sesuai dengan kondisi lapangan.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Anton Maulana menegaskan penataan ruang wilayah



harus mendapat pengawasan dan pembinaan. Jangan sampai tidak menjawab kebutuhan dan kondisi riil saat ini.

Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu memastikan penataan ruang mampu mengcover semua sektor. Bukan hanya zona industri atau pemukiman saja, namun juga berkaitan kesejahteraan masyarakat, seperti zona hijau.

“Karena kalau zona hijau diubah jadi industri tentu sangat berdampak pada stabilitas ketersediaan pangan dalam lingkup daerah. Artinya kita bisa impor, pertanian jadi melesu,” tegasnya.

Politisi Golkar ini mengakui, pe-

nataan ruang memang sangat dibutuhkan sebagai komando sektor pembangunan. Namun, stabilitas kehidupan masyarakat juga perlu diprioritaskan dan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.

“Dari segi pembangunan, perda RTRW ini memang sangat dibutuhkan. Maka perlu ada pengawasan dari pemkab terkait pelaksanaannya, misalnya berkaitan perbaikan jalan yang menunjang produktifitas masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Yoga Setiawan, SE menyampaikan, Perda RTRW Nomor

7 Tahun 2018 sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini dan akan berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon. Sementara, pemerintah daerah sudah mencanangkan di tahun 2023, PAD akan diperoleh sebesar Rp 810 miliar.

“Jika tidak ada aturan yang pasti pada tata ruang, maka pembangunan juga akan tidak tertata dan itu berpengaruh pada PAD kita,” ujarnya.

Selain itu, penataan ruang yang kurang tepat, dikhawatirkan akan menyebabkan ketimpangan dalam pembangunan. Sebut saja misalnya, mengenai perbatasan wilayah Kabupaten Cirebon dengan Kota Cirebon.

“Dalam peraturan bisa dibuat zona industri, tapi kondisi saat ini diperbolehkan untuk perumahan juga. Itu kan jadi semrawut. Apalagi di wilayah perbatasan itu harus ada kejelasan detail. Karena sangat berdampak bagi warga yang berada di lokasi perbatasan untuk mendapatkan pelayanan publik,” jelas politisi Hanura itu.

Yoga menuturkan, pola pembangunan yang terintegrasi dengan berbasis kajian matang, juga berpengaruh bagi pelaku usaha dan investor. Bila mengacu pada visi-misi kepala daerah, salah satunya peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengentasan pengangguran.

Maka, pemerintah daerah harus bisa mengelola dengan baik zona industri di Kabupaten Cirebon. Maka kehadiran Perda RTRW wajib memastikan itu.

“Kaitan pengangguran, misalnya bagaimana caranya home industri dan investor di Kabupaten Cirebon bisa terus bertambah. Dan itu bisa diwujudkan melalui Perda RTRW sebagai pintunya,” pungkasnya. •Par

Fawaz: Pastikan Keseimbangan Antar Kawasan

DPUPR mengklaim, kehadiran revisi perda akan mengubah wajah tata ruang lebih efektif dan pembangunan lebih masif.



Foto: foto: mih/qusoy/dk

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Cirebon menjelaskan 4 fokus dalam revisi rancangan peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Pertama, kebijakan penataan ruang, yang akan menegaskan pemanfaatan ruang di Kabupaten Cirebon melingkupi pemukiman, ruang hijau, ruang taman, dan sumberdaya alam.

Kedua rencana pola ruang, yang meliputi pertanian, industri, perdagangan, dan pendidikan. Ketiga, rencana struktur ruang, yang meliputi pusat pertumbuhan ekonomi, prasarana dalam perdesaan dan perkotaan. Keempat pengendalian pemanfaatan kawasan strategis kabupaten (KSK) dan provinsi.

Sebagaimana diketahui, penetapan kawasan

strategis dalam Perda Nomor 7 Tahun 2018, meliputi kawasan industri dan ekonomi. Terbagi: kawasan industri pergudangan, sentra batik Cirebon, pesisir terpadu, pariwisata terpadu, agro Arjawinangun dan agro Ciledug.

Dalam sudut kepentingan budaya, terdapat kawasan strategis yang terletak di Kecamatan Gunungjati. Kawasan sumber daya air mencakup: Kecamatan Susukan, Mundu, Sedong dan Ciledug. Sementara KSK sumber daya alam dan teknologi meliputi: Kecamatan Mundu, Astanajapura dan Pangenan.

Kabid Tata Ruang DPUPR Kabupaten Cirebon mengatakan, empat rancangan tersebut, menjadi acuan kepala daerah dalam menyesuaikan targetnya.



Namun bila dilihat dari presentase sejauh ini, prioritas pemerintah daerah adalah ruang pertanian dan ruang permukiman.

“Target dalam perda sebenarnya tidak dinamis. Namun keberadaan perda akan menjadi pedoman bagi kepala daerah dalam mencapai target visi dan misi,” tuturnya.

Sebelumnya, dalam Perda RTRW 2018-2038 Kabupaten Cirebon, kawasan pertanian disediakan 45 ribu hektare, atau sama dengan 42,05 % dari total

luas wilayah. Sementara untuk permukiman 21.194 hektare atau 19,80%.

Dadang menjelaskan, angka tersebut telah sesuai dengan ketersediaan dan kemampuan daerah. Meski menyesuaikan dengan visi-misi kepala daerah, namun tak boleh melanggar aturan tersebut.

Ia pun berharap, proses revisi perda akan bisa segera diselesaikan. Jika mengacu undang-undang, perda RTRW dapat ditinjau kembali setiap

lima tahun sekali.

Dadang menerangkan, revisi Perda RTRW akan menjadi kiblat sektor pembangunan dan sangat berpengaruh pada perkembangan wilayah 20 tahun ke depan. Dadang memastikan, perubahan perda akan menciptakan tata ruang yang lebih efektif.

Hal itu dikarenakan perencanaan revisi perda, telah melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sebagai instrumen untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan terintegrasi.

Saat ini tahap raperda telah mencapai Lintas Sektor (Linsek) atau persetujuan substansi DPRD Kabupaten Cirebon. Setelahnya akan diproses dan dikaji lebih dalam. Tahapan Linsek menjadi tiket agar bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya.

“Tahap terakhir tentu setelah diproses ke pusat. Tapi sebelum bisa diajukan ke pusat, internalnya harus selesai dulu, dan tahap Linsek ini adalah tiketnya,” terangnya.

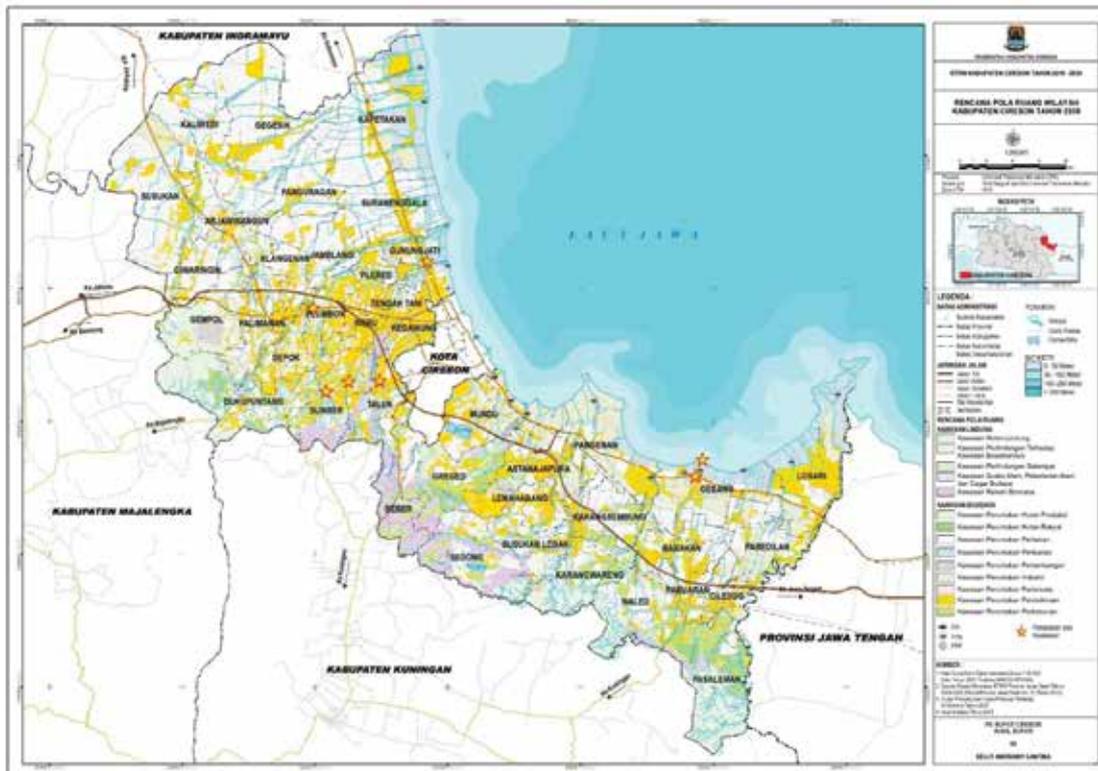
Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Ahmad Fawaz mengingatkan, agar prinsip utama yang perlu ditanamkan pemerintah daerah dalam merevisi Perda RTRW, adalah keseimbangan antar kawasan di Kabupaten Cirebon.

“Prinsip utama pemerintah daerah dalam pembentukan rancangan tata ruang wilayah itu keseimbangan antara kawasan pertanian, industri, permukiman, dan kawasan lindung. Jangan sampai berat salah satu tapi berdampak buruk bagi sektor lainnya,” tegas Fawaz.

Dia menilai, jika tidak ada keseimbangan antar kawasan, karena kesalahan RTRW, akan mengakibatkan bencana di kemudian hari. Akibatnya tata ruang tidak teratur dan pemba-

**PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2038**

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 7 Tahun 2018
TANGGAL : 7 Juni 2018
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2018 – 2038



ngunan kurang efektif.

Ketua Fraksi PKS itu pun menjelaskan, aturan yang proporsional, pengendalian dan penerapan aturan pada perda RTRW lebih penting untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

“Kami minta agar pengendalian pelaksanaan perda RTRW ini dilakukan dengan tegas, agar tujuan keseimbangan dan keteraturan dapat terwujud,” jelas Fawaz.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Yoga Setiawan juga senada. Menurutnya, penyusunan tata ruang, harus bisa melahirkan keseimbangan antar kawasan. Misalnya berkaitan lahan pertanian.

Ia menyebut, berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, lahan pertanian di Kabupaten Cirebon kurang dari 50 ribu hektare. Karenanya, pemerintah daerah harus bijak mengelola lahan pertanian yang ada.

“Saya berharap untuk lahan pertanian yang kurang produktif dialih fungsikan saja, misal zona pertanian tapi untuk pengairannya susah sebaiknya diganti menjadi pemukiman atau ruang hijau,” kata Yoga.

Politisi Hanura itu bahkan berpendapat, jika lahan pertanian tak produktif, sebaiknya diubah menjadi kawasan industri atau permukiman saja. Seperti yang

terjadi di Cirebon bagian timur, ada beberapa lahan pesawahan non produktif karena kesulitan air, dibangun pabrik industri.

“Jadi dari pada tidak terpakai, tapi tetap bisa bermanfaat karena investasi bisa masuk. Dan tentunya ada dampak positif masyarakat sekitar,” ungkapnya.

Efektifitas dan keberhasilan Perda RTRW dapat diukur, bila mampu mengintegrasikan semua sektor dengan baik.

“Artinya Perda RTRW harus bisa *mendrive* semua sektor dan bisa dijadikan pedoman. Maka itulah keberhasilan tata ruang. Dan tentunya bisa membawa kemajuan pembangunan Kabupaten Cirebon,” jelas Yoga. •par

#	Unit	Nomor Telepon
1	Polresta Kab. Cirebon	0231-204466
2	Polres Cirebon Kota	0231-205179
3	Pemadam Kebakaran Kab. Cirebon	0231-638249
4	Pemadam Kebakaran Kota	0231-484113
5	Ambulance	0231-206330 ext.1042
6	Pos SAR Cirebon	0231-8356347
7	Unit Transfusi Darah PMI Kota	0231-204964
8	Unit Donor Darah PMI Kota	0231-201003
9	Pengaduan PLN Kota Cirebon	0231-236551
10	Pengaduan Gangguan PDAM	0231-244222
11	PDAM Tirtajati (Sumber)	0231-321457
12	PDAM Kota Cirebon	0231-204800
13	Pengaduan Gas Kota Cirebon	0231-203323
14	Terminal Bis Harjamukti	0231-248902
15	Stasiun Kejaksan	0231-210444
16	Stasiun Parujakan	0231-202577
17	RSUD Arjawinangun	0231-358335 / 359090
18	RSUD Gunung Jati	0231-206-330
19	RSUD Waled	0231-661126; IGD: 0231-661275
20	RSIA Sumber Kasih	0231-203815
21	RS Ciremai	0231-238335
22	RS Hasna Medika	0231-343405; IGD: 0231-8825010
23	RS Mitra Plumbon	0231-323100
24	RS Pelabuhan	0231-230024 / 205657
25	RS Permata	0231-8338877 / 8338899; IGD 0231-8338881
26	RS Pertamina Klayan	0231-224797 / 224798; IGD: 08112433338
27	RS Putra Bahagia	0231-485654
28	RS Sumber Urip	0231-8302689
29	RS Sumber Waras	0231-341079

Apresiasi Program Polisi RW

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi menghadiri peluncuran program Polisi RW yang berlangsung di Mapolresta Cirebon. Polisi RW merupakan program Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri yang bertugas mendeteksi potensi permasalahan kamtibmas di lingkungan masyarakat tingkat RW, sekaligus mencari solusi.

Kapolresta Cirebon Kombes Pol Arif Budiman mengatakan, program yang melibatkan 730 personel tersebut akan disebar untuk melakukan tugas pelayanan terkait keamanan dan ketertiban mas-

arakat (Kamtibmas) di 2.353 rukun warga (RW) wilayah Kabupaten Cirebon. Program Polisi RW ini lebih mengedepankan upaya-upaya preventif dalam pemeliharaan Kamtibmas.

Menanggapi itu, Luthfi mengapresiasi adanya program Polisi RW tersebut. Ia berharap dengan diluncurkannya program yang dapat mereduksi berbagai potensi gangguan kamtibmas tersebut, segala bentuk permasalahan nantinya dapat dengan cepat diantisipasi. Sehingga masalah yang terjadi tidak meluas dan berdampak pada kondusifitas.



Beri Rekomendasi LKPJ 2022

DPRD Kabupaten Cirebon menyampaikan rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Cirebon tahun anggaran 2022. Di antaranya, DPRD meminta agar Bupati Cirebon memerintahkan OPD dapat bekerja sama dalam penyusunan LKPJ.

Menanggapi itu, Bupati Cirebon Imron menyambut baik rekomendasi yang disampaikan DPRD sebagai wujud kepedulian terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan di Kabupaten Cirebon.

Menurutnya, segala bentuk saran hingga kritik merupakan upaya perbaikan dan peningkatan efisiensi, efektifitas, produktifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Anggota DPRD sudah bergerak sesuai fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah, kami terima dengan baik. Poin-poin catatan strategis dari panitia khusus LKPJ merupakan bahan yang sangat berharga dan akan ditindaklanjuti demi optimalisasi kinerja pemerintahan Kabupaten Cirebon kedepan," kata Imron.



Buka Masa Sidang Ketiga

Rapat paripurna yang dihadiri 30 anggota DPRD Kabupaten Cirebon membahas pembukaan masa sidang ketiga sekaligus menutup masa sidang kedua yang berakhir pada April 2023 lalu. Berbagai agenda persidangan dibahas yang akan berlangsung hingga Agustus 2023.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Rudiana mengatakan, di dalam masa sidang kali ini terdapat bermacam-macam agenda, salah satunya mengenai tahapan anggaran pendapatan dan belanja daerah

(APBD) 2024 serta kegiatan umum lainnya.

“Kita sekarang memasuki masa sidang ketiga. Makanya kita tutup dulu masa sidang kedua, baru kita buka masa sidang ketiga yang dimulai dari Mei sampai Agustus 2023 nanti,” kata Rudiana.

Rudiana mengungkapkan sidang ketiga juga akan menyroti Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS). “Kita akan lakukan itu. Maka kita berharap sinergitas dengan Bupati Cirebon agar masukan dari kami dapat diterima,” ungkapnya.



Dorong Peningkatan Honor Puskesmas

Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinsos Kabupaten Cirebon dan perwakilan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas). Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Aan Setiawan meminta Dinsos untuk lebih memperhatikan kesejahteraan petugas Puskesmas. Ia menilai, honor yang diterima petugas puskesmas tak sebanding dengan risiko dan tenaga yang dikeluarkan.

Aan mengungkapkan, dalam menjalankan tugasnya, petugas puskesmas kerap mendapat banyak tekanan dari masyarakat. Di sisi lain, petugas pus-

esos hanya mendapatkan bayaran atau honor sebesar Rp 300 hingga Rp 700 ribu.

“Anggota puskesmas yang ada empat orang setiap desa ini menjadi polemik. Mereka banyak tekanan dari masyarakat, tugasnya banyak di lapangan tapi ternyata honorunya kecil,” kata Aan.

Ia pun mendorong Pemkab Cirebon agar bisa meningkatkan honor petugas puskesmas. “Bagaimana caranya untuk meningkatkan honor teman-teman puskesmas yang minimalnya Rp 500 ribu per bulan, agar kerja mereka lebih maksimal,” ujar Aan.



Mohon Perbaiki Tanggul Rusak

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Salam hormat Bapak/Ibu anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Saya Suryani (26) warga Desa Kalibuntu. Saya ingin melaporkan kondisi tanggul Sungai Cisanggarung yang kian mencemaskan. Sejak 2018, kondisi tanggul rusak akibat abrasi dan terus mengikis badan jalan, padahal jalan tersebut merupakan akses utama bagi pengguna roda dua dan roda empat yang hendak menuju Kecamatan Ciledug maupun sebaliknya.

Kendati demikian, warga tetap melakukan upaya antisipasi bilamana terjadi peningkatan debit air secara tiba-tiba, dengan menumpuk kantong-kantong berisi material padat seperti pasir dan tanah. Meski begitu, kami tetap mengharapkan upaya yang lebih serius baik dari DPRD Kabupaten Cirebon, BBWS, maupun Pemkab Cirebon untuk membuat tanggul permanen yang lebih tahan bencana.

Terima kasih Cirebon Katon berkenan menerbitkan.

Wassalamu'alaikum wr wb

(Suryani/Karyawan/Kalibuntu)



Sampah Menumpuk di Terowongan Rel

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Permasalahan umum yang ditemui di perkampungan menumpuknya sampah di pinggir jalan, bahkan di sungai. Belum optimalnya sistem pengelolaan sampah di desa, serta kurangnya ketersediaan TPS dan petugas kebersihan, menjadi penyebab.

Seperti yang terlihat di Jalan KH Wahid Hasyim Desa Mertapadawetan. Minimnya kesadaran tentang lingkungan membuat sampah di terowongan rel kereta menumpuk. Seharusnya, Pemerintah dan setiap pemangku kebijakan harus lebih serius dalam menyikapi permasalahan sampah yang membelit Kabupaten Cirebon.

Pemkab Cirebon harus dengan konsisten mendukung, bersinergi serta mengedukasi tentang pentingnya menekan produksi sampah demi kebersihan, dan kelestarian lingkungan.

Wassalamu'alaikum wr wb

(Yuda/Aktivis/Lemahabang)

Awasi Lokasi Putar Balik Sembarangan

Lokasi untuk putar balik atau u-turn, kerap menjadi tempat kecelakaan antara kendaraan bermotor. Tak sedikit kendaraan memutar balik di lokasi rambu larangan putar balik. Minimnya etika, serta kesadaran berkendara, seringkali menjadi penyebab kecelakaan itu sendiri.

Keadaan tersebut diperparah dengan keberadaan petugas u-turn yang tidak memahami siapa yang harus mendapatkan prioritas saat ada kendaraan akan berputar arah.

Jika kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, semestinya kita sadar bagaimana etika saat memutar arah. Tapi nyatanya banyak masyarakat seakan tak mau tau, bahkan terkesan acuh terhadap aturan tersebut.

Saya berharap, DPRD Kabupaten dapat menegakan, menindak, serta mengedukasi masyarakat agar sadar dan peduli tentang keselamatan dan aturan berlalulintas.

(Akbar/Mahasiswa/Plered)



Asap Pembakaran Jerami Ancam Keselamatan

Belakangan ini, jalur Pantura Cirebon – Indramayu Desa Susukan diselimuti asap tebal, yang berasal dari pembakaran jerami hingga mengakibatkan jarak pandang menjadi terbatas. Jika berkaca pada insiden di ruas tol Pejagan – Pemalang pada September 2022 yang lalu, pembakaran jerami harusnya dihindari. Insiden tersebut mengingatkan kita, betapa besar potensi bahaya yang ditimbulkan dari asap jerami.

Selama ini, banyak petani yang berpikiran bahwa abu yang dihasilkan dari pembakaran jerami dapat membuat tanaman terhindar dari hama dan penyakit.

Saya berharap, DPRD dapat hadir mengedukasi petani agar tidak lagi membakar jerami sisa panen mereka. Karena selain berdampak buruk terhadap kualitas tanah, tindakan tersebut juga dapat mengancam keselamatan, terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr wb.

(Akbar/Karyawan/Kaliwedi)

Energi Ramah Lingkungan dari Kotoran Sapi

Di tangan Iqbal, kotoran sapi diubah jadi energi ramah lingkungan untuk kebutuhan sehari-hari. Ia juga memanfaatkannya untuk membuat produk pupuk kandang. Seperti apa?



Foto: foto:quusoy/dk

Apa yang ada di benak saat mendengar kotoran sapi? Bagi kebanyakan orang, tentu, barang kotor itu hanya bisa dibuang atau dihanguskan. Namun di tangan pria satu ini, barang kotor tersebut menjadi bernilai dan ramah lingkungan.

Adalah Iqbal Iswanto, yang telah berinovasi membuat biogas dari kotoran sapi. Dengan alat sederhana, Iqbal memanfaatkan kotoran sapi tersebut menjadi energi pengganti gas.

“Dengan alat sederhana, alhamdulillah saya bisa membuat biogas, walaupun kapasitasnya masih sedikit, paling kemampuan menyala di kompor hanya 30 menit,” ujar Iqbal.

Untuk diketahui, biogas adalah gas alami yang dihasilkan dari pemecahan bahan organik oleh bakteri anaerob dan digunakan dalam produksi energi.

Biogas berbeda dengan gas alam karena biogas merupakan sumber energi terbarukan yang diproduksi secara biologis melalui pencernaan anaerobik.

Warga Desa Warukawung, Kecamatan Depok menjelaskan, biogas yang dihasilkan dari kotoran sapi ini sebelumnya ditampung dalam wadah tertutup untuk difermentasi.

Untuk membuat biogas, dibutuhkan kotoran dari 3 ekor sapi. Selanjutnya kotoran tersebut akan dicampur dengan air selama tiga minggu. Setelah itu, biogas akan terbentuk dan dapat dialirkan melalui pipa untuk kebutuhan sehari-hari pengganti gas tabung.

Agar durasi bioagas dapat bertahan lama, dibutuhkan penyimpanan dan minimal 3 tabung besar. Tabung pertama untuk pencampuran bahan, tabung

ke dua untuk penyimpanan, dan tabung terakhir untuk penyimpanan gas.

“Proses tersebut cukup untuk kebutuhan rumah sehari-hari, untuk masak, bikin kopi dan lain-lain,” terang Iqbal.

Menjadi peternak sapi di usia 23 tahun merupakan pilihan hidupnya. Iqbal tak gengsi sedikitpun. Justru ia sangat bangga melakoni pekerjaannya. Iqbal menyadari, banyak potensi sumber daya alam di desanya yang harus dikembangkan.

“Memang setelah lulus SMK, saya langsung mendalami peternakan. Enggak kerja kemana-mana. Kebetulan orang tua saya juga peternak kambing sampai sekarang. Jadi saya termotivasi untuk mengembangkan diri, dan saya pun bangga menjadi anak peternak,” jelasnya.

Iqbal berharap banyak pemuda yang bisa mengikuti jejaknya untuk menjadi peternak sapi, karena beternak sapi sangat potensial dan menjanjikan.

“Bila ada teman-teman yang mau belajar, rumah saya terbuka dan saya pun siap untuk sama-sama belajar untuk kemajuan bersama,” tambahnya.

Selain membuat biogas dari kotoran, Iqbal juga mampu mengolahnya menjadi pupuk kandang. Sisa kotoran sapi, ia campurkan dengan abu sekam dan serbuk kayu. Dalam seminggu, Iqbal mampu memproduksi sekitar 1 kuintal pupuk kandang.

“Kalau pupuk organik saya jual sekitar Rp 1.000 sampe 1.500 per kg. Kalau pupuk urine sapi saya biasa jual sekitar Rp 80 ribu per 5 liter,” jelasnya.

Iqbal belum bisa melanjutkan biogasnya karena membutuhkan biaya besar untuk proses instalasi. Waktu itu ia memanfaatkan tabung ukuran 100 liter untuk menghasil-



kan gas berdurasi 15 menit. Saat ini ia masih berfokus ke pemanfaatan limbah kotoran sapi untuk pupuk organik padat dan cair.

Prosesnya hampir sama dengan pembuatan biogas, pembuatan pupuk organik cair ini menggunakan urine sapi yang dicampur dengan rempah-rempah seperti kunir kencur terasi dan lain-lain. Setelah itu disimpan dalam tong besar dan menunggu

fermentasi selama tiga minggu.

Saat ini, Iqbal aktif menjadi peternak milenial Jawa Barat dan sering mengikuti pelatihan yang dilaksanakan dinas pertanian.

Pria lulusan SMK Al Musyawirin Weru itu berharap, biogas dan pupuk kandang miliknya bisa terus dikembangkan kedepannya. Sehingga memberikan manfaat bagi para petani di Kabupaten Cirebon. •Soy

Di Tangan Ondi, Ban Bekas Jadi Kreativitas

Baru saja terik matahari meninggi, Ondi akan bergegas menyiapkan pekakas. Tumpukan ban bekas di depan rumahnya pun ia ambil.

Bagi kebanyakan orang, ban bekas sering dianggap limbah. Namun di tangan Ondi, ban bekas diubah jadi kerajinan yang bernilai. Ia menyulapnya menjadi furnitur berharga.

Dalam sehari, pria 45 tahun itu, mampu memproduksi 8 kursi dan 2 meja dari ban bekas.

Ia bercerita, kerajinan ini merupakan pengem-

banan dari usaha ayahnya. Ondi berkreasi agar tak hanya memproduksi tali. "Dulu ayah saya produksi tali karet dari ban bekas. Pada tahun 2003 saya mulai membuat kursi dan meja," ungkap Ondi.

Untuk satu paket furnitur ban bekas, Ondi menjualnya dengan harga ratusan hingga jutaan rupiah tergantung jenis dan kerumitannya.

"Saya baru jual ini secara langsung melalui kerabat dan teman-teman yang memiliki toko. Ada yang dari Semarang, di Karawang dan Garut," tuturnya. •Soy



Marsaid Budi Riyanto Setiap Kamis, Wajibkan Bebasan Cerbon

Sejak kecil Marsaid telah bercita-cita menjadi pendidik. Saat ini ia menduduki kepala sekolah dan menginisiasi program kamis bebasan. Bagaimana kisahnya?

Menjadi pendidik merupakan hal yang paling berkesan bagi pria yang satu ini. Sosok perantau yang akhirnya menetap dan memilih mengabdikan diri di Cirebon.

Ia adalah Marsaid Budi Riyanto, kepala sekolah SMP Negeri Satu Atap Losari Desa Tawang Sari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Sebelum menduduki pimpinan tersebut, Marsaid sapannya, lebih dahulu berkarir menjadi guru di SMP N 1 Astanajapura. Beragam jabatan pun sempat ia emban.

“Kalau jadi kepala sekolah memang baru Oktober tahun 2022 kemarin. Tapi jadi PNS nya sejak tahun 1997. Saya di Astanajapura lama bahkan pernah menjadi wakil kepala sekolah, sarana dan prasarana sampai di bidang kurikulum,” kata pria asli Klaten tersebut.

Bagi Marsaid, berprofesi guru merupakan cita-cita Marsaid sedari kecil. Terlebih kedua orang tuanya juga berprofesi serupa. Bagi Marsaid, guru itu merupakan manusia yang mulia, sebab sangat berperan dalam kehidupan.

“Jadi guru itu pekerjaan yang menarik. Bahkan bagi saya jadi guru itu karena panggilan hati. Ini adalah cita-cita saya dari kecil dan saya bersyukur sekali kesempatan,” ungkap pria lulusan Universitas Kuningan (UNIKU) itu.

Selama menjadi guru, Marsaid tentu mengalami pahit manisnya. Namun itu justru membuatnya semakin bersemangat mendidik. Tak pelak, beberapa muridnya pun termotivasi.

“Ada salah satu murid saya yang sudah lulus, dia anak orang tidak berada. Lalu masuk perguruan



Foto-foto:qusoy/ck



tinggi dan lurus. Sekarang jadi guru, dan ternyata dia termotivasi oleh saya sampai sukses sekarang,” ungkap Marsaid.

Tak kurang enam bulan Marsaid menduduki jabatan kepala sekolah. Perubahan signifikan pun dirasakan. Salah satunya dengan lahirnya pembiasaan kebersamaan.

“Di sekolah ini ada pembiasaan baru soal kebersamaan antara guru dan siswa setiap hari Selasa. Sistemnya siswa bawa makanan guru juga bawa, terus kita di lapangan makan bersama,” tuturnya.

Pembiasaan kebersamaan tersebut, tak hanya mengenai makan bersama. Namun lebih dari pada itu. Dalam momentum itu, siswa dan guru lainnya kawan. Tak ada batasan status sosial. Semua bergurau sehingga para siswa juga bisa tampil menunjukkan bakatnya.

“Murid yang suka puisi,

nyanyi, nari. Itu kita apresiasi buat tampil dan kita fasilitasi di pembiasaan ini. Ini bisa untuk melatih mental murid juga,” jelasnya.

Selain itu, ada pembiasaan lain di hari Kamis dengan berbahasa *bebasan*. Setiap Kamis, guru dan murid menggunakan *bebasan* di setiap pembelajaran.

“Kamis *bebasan* ini menjadi identitas kita sebagai orang Jawa. Dulu tidak ada, sekarang saya coba biasakan seminggu sekali ngomong *bebasan*,” jelas Marsaid.

Dengan adanya kebiasaan tersebut, Marsaid berharap, bahasa Cirebon akan terawat dan terjaga karena dikenalkan sejak dini.

“Itu yang jadi harapan. Apalagi bahasa Cirebon sudah mulai jarang digunakan,” ujar Marsaid.

Di luar kesibukannya menjadi pendidik, Marsaid memiliki hobi berolahraga. Tak heran,

setiap Sabtu ia juga mewajibkan seluruh siswa untuk senam pagi.

“Karena saya hobi berolahraga, setiap Sabtu kita juga biasakan senam pagi yang diikuti seluruh siswa dan murid,” ungkapnya.

Sementara di akhir pekan, Marsaid akan berolahraga dengan bersepeda. Baginya, bersepeda memiliki filosofi sendiri.

“Saya suka bersepeda. Paling jauh saya ikut kegiatan dinas muter dari Talun ke Sedong, Astanajapura sampai balik lagi. Pernah juga sampai Waduk Darma Kuningan,” jelas Marsaid.

Selain bersepeda, Marsaid juga hobi membaca. Dalam sehari minimal ia harus membuka buku untuk membaca. Meski hanya selembarnya.

“Karena saya juga seorang guru jadi saya suka membaca. Buku apa saja saya baca terutama buku pelajaran,” pungkasnya. •Kus

Hj Rukyati S Pd

Dijuluki Kepala Sekolah Pembangunan

Tak ada sekolah yang disinggahi Rukyati selain menorehkan prestasi. Rukyati dikenal karena kepiawaiannya melahirkan program inovasi. Bagaimana kisahnya?

Baru seumur jagung, Rukyati diamanahi kepala sekolah SMP Negeri 1 Weru, Kabupaten Cirebon. Meski demikian, perubahan secara signifikan tampak terjadi di lingkungan pendidikan. “Baru sebulan setengah saya menjabat di sini,” ungkapnya

Dalam kurun sebulan, Rukyati sudah menginisiasi pembangunan perpustakaan dan ruang resepsionis.

“Di sini sudah mulai berbenah, membuat ruang perpustakaan sekolah terbagus di Kabupaten Cirebon,” ujarnya.

Selain infrastruktur sekolah, Rukyati juga membangun karakter warga sekolah yang islami dan hobi baca melalui program “Jumpa Bukur White Kopi.”

Jumpa Bukur White Kopi tersebut adalah akronim Jum’at Pagi Buka Alquran, dan Salawat Koleksi Pindah.

Dengan membaca alquran dan salawat, diharapkan dapat membangun karakter islami, dan memiliki budi pekerti luhur.

Sementara untuk meningkatkan hobi baca, Rukyati menugaskan para siswa membaca buku selama seminggu dan diharuskan untuk mereviewnya.

“Setelah membaca salawat, anak yang sudah selesai membaca untuk maju menghadap mentornya dan mereview bukunya. Kalau sudah, buku tersebut dipindahkan ke temannya secara estafet sampai buku itu balik lagi ke tempat awalnya,” kata Rukyati.

Berkat inisiasi program tersebut, Rukyati mendapat julukan kepala sekolah pembangunan dari jajaran guru dan siswa SMP N 1 Weru.

Sebelum menjabat Kepala Sekolah SMP N 1 Weru, Rukyati mengawali karirnya sebagai guru di SMP N 2 Arjawinangun (seka-





rang SMP N 1 Panguragan) pada 1988 hingga 1994.

“Di tahun 1994 sampai 2016 saya jadi guru di SMP N 1 Weru,” tuturnya.

Barulah di tahun 2016, Rukyati pertama kali diamanahi untuk memimpin Sekolah Satu Atap Karangsembung selama satu semester.

“Kemudian dipindahkan lagi menjadi Kepala Sekolah di SMP N 1 Pangenan,” ujar perempuan kelahiran 1967 tersebut.

Rukyati mengaku, setiap sekolah yang ia duduki tak pernah absen masuk kategori 5 besar Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat Kabupaten Cirebon.

Saat memimpin SMP N 1 Pangenan misalnya, Rukyati berhasil membawa peringkat ke 4 OSN tingkat kabupaten.

“Saya seperti mimpi, meski sekolah pinggir tapi berhasil masuk nominasi,” terangnya.

Di tahun 2019, Rukyati dipindah tugaskan ke SMP N 2 Sumber dan berhasil meraih sekolah Adiwiyata. Selang dua tahun, ia pun diamanahi untuk memimpin SMP N 2 Plumbon dan menorehkan juara 1 OSN untuk mapel IPA.

“Saya tidak menyangka bisa juara 1 OSN tingkat Kabupaten Cirebon,” kata Rukyati.

Rukyati mengaku, semua pres-

tasi yang didapat di setiap sekolah yang dipimpinnya karena kemampuan mengorganisasi kerja tim.

“Bukan karena saya sendiri, tentu semua itu kerja tim yang melalui manajemen, sehingga dapat membuat siswa berhasil mendapat juara OSN tersebut,” ungkapnya.

Bagi Rukyati, sisa jabatan menjadi kepala sekolah, ia manfaatkan untuk menuai ragam prestasi pendidikan “Dua tahun lagi saya juga akan pensiun. Makanya sisa waktu ini saya manfaatkan betul untuk membangun karakter siswa dan kontribusi nyata bagi pendidikan,” tandasnya. •Din

Komisi III: Segera Atasi Kemacetan Jalan Kedawung-Warungasem

Warga mengeluhkan kemacetan di sepanjang Jalan Sultan Ageng Tirtayasa. Diketahui karena sempitnya jalan dan banyaknya pelaku usaha di sepanjang ruas.



Foto-foto: mti/qusoy/d

Kemacetan di sepanjang Jalan Kedawung hingga Warungasem atau Jalan Sultan Ageng Tirtayasa mendapat perhatian Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon. Setiap hari, jalan yang merupakan akses utama tersebut dikeluhkan warga karena mengganggu aktivitas. Mereka meminta agar Pemerintah Kabupaten Cirebon segera menyelesaikan kemacetan.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Anton mengatakan, selain kerusakan jalan, kemacetan

Jalan Kedawung hingga Warungasem disebabkan banyaknya para pelaku usaha yang berjualan di sepanjang jalan.

Seperti diketahui, Jalan Kedawung hingga Warungasem merupakan ruas jalan tipe c, yang hanya dapat dilalui kendaraan bermuatan maksimal 8 ton. Bagi kendaraan dengan kapasitas di atas 8 ton dilarang melewati jalan tersebut. Namun fakta di lapangan, masih banyak kendaraan yang melanggar.

Padahal Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ru-



ang (DPUTR) sebelumnya telah memasang rambu-rambu batas muatan tonase kendaraan dan pengaturan jam operasional bagi para pelaku usaha.

Anton pun telah memberikan dua pilihan solusi kepada para pelaku usaha yang berkumpul di Kecamatan Kedawung agar mau menaati peraturan.

“Saya berikan opsi sekarang

agar para pelaku usaha bisa taat dengan aturan yang ada,” ujarnya saat memimpin kunjungan kerja Komisi III di Kecamatan Kedawung.

Para pedagang diharapkan bisa mematuhi aturan yang ada. Sehingga kedepannya jalan rusak dan macet di Kedawung segera teratasi.

“Dua opsi yang diberikan

para pelaku usaha harus taat pada aturan hukum yang berlaku atau para pelaku usaha wajib iuran untuk membantu perbaikan jalan,” tegasnya.

Sementara itu Dinas PUTR Kabupaten Cirebon menargetkan perbaikan jalan akan dilakukan di akhir Mei 2023. Adapun jalan yang akan diperbaiki yakni sebanyak 48 ruas jalan yang dimulai sejak 23 Maret 2023 lalu melalui 8 Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD).

Kecamatan Kedawung termasuk dalam UPTD 4. Yang meliputi ruas Kedawung-Warungasem, Ciperna-Warungasem, Kertawinangun-Kaliko, Tuparev, Kelurahan Sendang dan Jalan Keluarahan Sendang.

Anton menjelaskan, perbaikan jalan merupakan salah satu prioritas dalam APBD 2023 dan 2024. Ia pun memastikan akan mengawasi proses perbaikan jalan yang dilakukan DPUTR.

Sebelumnya DPUTR Kabupaten Cirebon juga menargetkan pelebaran ruan Jalan Sultan Ageng Setrayasa. Kepala DPUTR Kabupaten Cirebon Iwan Rizki membenarkan pelebaran jalan penghubung dua kecamatan tersebut telah direncanakan bahkan sejak 2015 silam. Namun baru terealisasi pelebaran sepanjang 1,7 km dengan luas selebar 1 meter pada 2021.

Sebagaimana diketahui, Jalan Sultan Ageng Tirtayasa saat ini hanya selebar 7 meter. Hal itu pun dinilai tidak ideal jika melihat kondisi saat ini. Sementara panjang jalan adalah 5,51 kilometer. DPUTR Mewacanakan akan ada pelebaran menjadi 11 meter.

“Kita juga masih menunggu upaya pelebaran jalan yang akan dilakukan DPUTR untuk melerai kemacetan di jalan ini. Semoga terealisasi di tahun ini,” pungkas Anton. •Suf

Evaluasi Penggunaan Dana Desa

Junaedi minta konflik dugaan penyelewengan anggaran Pemdes Tambelang segera diselesaikan. Pemkab jangan acuh. Seperti apa?



Foto: foto: Dok. Setwan

Sudah enam bulan lamanya Desa Tambelang, Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon diterjang konflik akibat dugaan penyelewengan anggaran dana desa tahun 2022 senilai Rp 168 juta.

Dugaan penggelapan anggaran desa tersebut, membuat warga jengah dan meminta ada pengembalian dan itikad baik oleh kuwu.

Puncaknya, pada Maret 2023 silam, para warga bersama lembaga desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyambangi kantor desa, meminta kuwu Desa Tambelang agar mundur.

Pertemuan diakhiri dengan kesepakatan agar kuwu segera menggelar pekerjaan anggaran tahun

2022 yang masih tertunda dan membuat pernyataan pengunduran diri.

Atas desakan warga, Kuwu Desa Tambelang Gustiawan Herfain menyatakan siap untuk mengembalikan kepercayaan warga dan bertanggungjawab atas dugaan tersebut.

Ketua BPD Desa Tambelang Castalim mengatakan, desakan warga yang menginginkan kuwu mundur dari jabatannya disampaikan saat mendatangi kantor desa. Ia pun sempat meminta tanda tangan dari warga, sebagai bentuk mosi tidak percaya.

Castalim menerangkan, Kuwu Desa Tambelang secara lisan berjanji akan mengembalikan anggaran yang diduga telah terpakainya, namun hingga



saat ini belum juga ditepati.

Ia pun telah melaporkan kasus tersebut ke Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD). Namun hingga kini, ia mempertanyakan sikap Pemerintah Kabupaten Cirebon yang acuh dengan laporan dari BPD Desa Tambelang.

Sejak pertama kisruh dugaan penyelewangan anggaran pada November 2022 silam, BPD Desa Tambelang mengaku telah melayangkan surat kepada Pemkab Cirebon. Namun hingga Mei 2023, belum ada titik temu dan tak pernah mendapat balasan.

"Kami mewakili masyarakat Desa Tambelang ingin menanya-

kan sejauh mana proses yang sudah dilakukan baik perjalanan dan pencapaiannya khususnya pembinaan dari Pemkab Cirebon," ungkapnya, saat menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon.

Akibatnya, ia tak banyak bicara saat ditanya masyarakat mengenai kelanjutan konflik di Desa Tambelang tersebut.

"Jawaban apa yang harus diberikan kepada masyarakat ketika masyarakat Desa Tambelang mempertanyakan prosesnya sudah sejauh mana. Karena saya sendiri belum tahu," jelas Castalim.

Sementara itu, Kuwu Desa Tambelang Gustiawan Herfain

menyatakan, bahwa sampai hari ini sudah berusaha memperbaiki kesalahan yang sudah terjadi. Ia pun bersedia memperbaiki tupoksi dan kinerjanya.

"Dan bisa disampaikan kepada masyarakat ada itikad baik dari saya untuk memperbaiki dan menjalankan tupoksi saya sebagai Kuwu sesuai dengan aturan yang ada," ujarnya.

Menanggapi itu, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon H Junaedi ST mengatakan, sesuai mandat dari pimpinan DPRD, Komisi I diberikan tugas untuk memonitoring evaluasi perkembangan konflik Desa Tambelang.

Sudah banyak disampaikan, pada prinsipnya apa yang terjadi di Pemerintah Desa Tambelang sudah ada progres lebih baik dari sebelumnya.

Junaedi berharap, situasi di Desa Tambelang bisa kembali normal dan kondusif dari gejolak. Ia pun mengingatkan, dalam kasus yang terjadi di Desa Tambelang, diharapkan Pemerintah Daerah jangan berpuas diri. Tetap lakukan pengawasan dan pembinaan agar indikasi itikad baik ini terus berlanjut.

"Pembinaan dan pengawasan yang menjadi kewajiban Bupati itu didelegasikan kepada Camat. Di sini kepanjangan tangan bupati adalah camat, karena Bupati tidak akan sanggup jika harus membina secara langsung 412 Kuwu yang ada di Kabupaten Cirebon," ujarnya.

Junaedi juga meminta agar kedepan Pemdes Tambelang dalam melaksanakan kegiatan desa dapat berjalan dan dipertanggungjawabkan. Sebagai tindak lanjut, Komisi I akan melaksanakan rapat dengan Inspektorat dan Bagian Pemerintahan untuk membahas konflik Pemerintah Desa Tambelang ini. •Suf

Jelang Pilwu 2023 Desa Harus Bereskan Aset dan LKPJ

Komisi I ingatkan seluruh desa agar menginventarisasi aset dan melaporkan LKPJ sebelum Pilwu serentak 2023.



Foto: foto: Dok Setwan

Menjelang pemilihan kuwu (Pilwu) serentak tahun 2023, Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon gencar melakukan sosialisasi tahapan Pilwu. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Sofwan ST mengungkapkan, ada 100 desa yang akan melaksanakan Pilwu.

“Bulan ini kami sudah melakukan sosialisasi terhadap desa-desa tersebut, agar tetap menjaga kondusifitas sampai pemilihan,” ungkapnya.

Sofwan menilai, Pilwu 2023 berpotensi memanas dan mudah konflik, karena berdekatan dengan pemilihan legislatif (Pileg) maupun pemilihan presiden (Pilpres) yang akan digelar pada Februari 2024. Ia pun khawatir ada oknum yang memanfaatkan momentum tersebut untuk menunggangi Pilwu.

Sofwan menegaskan agar perangkat desa mam-

pu menjaga profesionalitas dan integritas serta netralitas.

Di Kecamatan Mundu ada dua desa yang akan Pilwu yakni Desa Setupatok dan Desa Suci. Komisi I pun telah menyosialisasikan kedua desa tersebut, agar sebelum Pilwu seluruh aset dan fasilitas desa dapat didata.

Setiap pasca Pilwu, selalu saja ada desa yang berkonflik soal aset, sehingga perlu langkah mitigasi. Sofwan menghimbau perangkat desa untuk segera menginventarisasi aset desa sebelum masa jabatan kuwu berakhir.

Meski demikian, Sofwan optimistis Pilwu 2023 akan berjalan lancar. Tak henti, Komisi I akan turun langsung dan memberi himbauan agar seluruh perangkat desa bersikap netral. “Kami telah memberi



himbauan perangkat desa yang tidak netral akan dikeluarkan sesuai aturan,” tegas Sofwan.

Dia juga menjelaskan, saat pilwu berlangsung, Pelaksana Tugas (PLT) kuwu diganti sekretaris desa. Sofwan berharap, perangkat desa bisa bersinergi agar pelaksanaan pilwu berjalan lancar.

Lebih lanjut, tak kalah penting sebelum Pilwu berlangsung adanya dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kuwu. Para kuwu yang berniat mencalonkan kembali diharuskan mendapatkan surat

dari Inspektorat Kabupaten Cirebon yang menyatakan kelengkapan administrasi dan tidak mempunyai tunggakan.

Untuk mendapatkan surat dari inspektorat, kuwu harus menyampaikan LKPJ terlebih dahulu. Sofwan menegaskan agar seluruh desa yang akan Pilwu segera menyelesaikan LKPJ sesuai peraturan yang berlaku.

“Nanti LKPJ akan diproses oleh inspektorat, karena yang mengeluarkan surat keterangan itu kan inspektorat. Makanya, saya memberi ketegasan LKPJ harus selesai 6 bulan sebelum masa

jabatan habis,” tegas Sofwan.

Bila LKPJ dapat diselesaikan 6 bulan sebelum masa jabatan habis, perangkat desa akan punya banyak waktu untuk menyiapkan pilwu.

Hal tersebut tidak hanya berlaku untuk 100 desa yang akan mengadakan pilwu saja, namun juga untuk seluruh desa di Kabupaten Cirebon.

“Ini juga berlaku untuk seluruh desa. Jika perangkat desa bisa menyelesaikan LKPJ 6 bulan sebelum jabatan berakhir, maka 6 bulan berikutnya mereka tinggal selesaikan laporan tambahan lainnya,” tambahnya.

Sofwan menjelaskan, jika kuwu tidak bisa menyelesaikan LKPJ dalam 6 bulan sebelum masa jabatan berakhir, maka mereka akan mendapatkan sanksi administratif.

LKPJ merupakan kewajiban desa yang harus dipenuhi sebelum masa jabatan berakhir. Maka tak ada alasan lagi terlambat.

“Itu kewajiban desa untuk bisa menyelesaikan persoalan administrasi dan keuangan, termasuk di dalamnya soal aset-aset desa,” jelas Sofwan.

Berdasarkan laporan dari Inspektorat Kabupaten Cirebon, tahun 2023 hampir seluruh desa telah menyelesaikan LKPJ. Ia pun mengapresiasi langkah tersebut. Meski demikian, Sofwan kembali mengingatkan agar seluruh perangkat desa bersinergi bersama untuk menjaga keadaan tetap kondusif, sebelum maupun sesudah pilwu.

“Menjelang tahun politik nasional, kami berharap pemerintah desa bisa menjaga kondusifitas desanya masing-masing. Kemudian pasca pilwu, tidak usah ribut-ribut, karena biasanya kan gitu. Jadi saya berharap betul pada perangkat desa,” katanya. •par

Pastikan PPDB 2023 Sesuai Aturan

Komisi IV minta pemerintah desa turut membantu pelaksanaan PPDB SMP tahun 2023, guna tingkatkan indeks pendidikan. Bagaimana caranya?



Foto: foto: Dok. Setwan

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2023 dipastikan mulai berjalan pada Juni hingga Juli 2023. Seluruh lembaga pendidikan di Kabupaten Cirebon pun bersiap untuk menyambut kegiatan tersebut. Salah satunya SMP Negeri 1 Mundu yang terletak di Desa Luwung, Kecamatan Mundu.

Seperti diketahui, SMP N 1 Mundu memiliki 29 rombongan belajar (Rombel) dengan total 976 siswa. Sementara tenaga pendidik berjumlah 52 guru.

Kepala Sekolah SMP N 1 Mundu Hermawan mengatakan, dalam rangka mempersiapkan PPDB, ia telah membuka 4 jalur pendaftaran: zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua. Hal tersebut sesuai dengan arahan Dinas Pendi-

dikan (Disdik) Kabupaten Cirebon.

Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon juga membuka 4 jalur untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam situs resminya.

“Kami membuka ada 4 jalur yaitu, Zonasi, Afirmasi, Prestasi, dan Perpindahan Tugas Orang Tua. Pelaksanaan PPDB tahap 1 akan dimulai pada tanggal 12 sampai 16 Juni 2023,” jelas Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Drs. H. Amin.

Amin menyebutkan, SMP Negeri 1 Mundu merupakan salah satu sekolah di Kabupaten Cirebon yang banyak digandrungi masyarakat karena mendapat akreditasi baik. Meski demikian, ia meng-



ingatkan agar SMP N 1 Mundu memperhatikan persyaratan administrasi saat pelaksanaan PPDB berlangsung.

Amin berharap SMP Negeri 1 Mundu bisa menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain, dalam pembangunan maupun pembelajaran.

“SMP Negeri 1 Mundu termasuk sekolah yang memiliki kemajuan signifikan, baik itu dari segi fisik maupun proses pembelajaran, sehingga banyak diminati oleh masyarakat sekitar,” ungkapnya saat mengunjungi SMP Negeri 1 Mundu bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Mei 2023 lalu.

Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Siska Kirana menerangkan, dalam proses PPDB kerap mendapat laporan administrasi domisili palsu.

Bila dibiarkan, Siska khawatir warga asli sekitar sekolah akan tereliminasi karena kuota PPDB telah habis. Diperkirakan tahun 2023 ada 32 ribu siswa SD yang telah mengikuti ujian, dan siap melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP.

Oleh karena itu, Siska berharap sekolah akan lebih selektif lagi saat pelaksanaan PPDB nanti. Selain itu, lembaga pendidikan harus bisa mengontrol PPDB tahun 2023 agar tidak ada pendaftar yang kecewa.

“Kami dari Komisi IV mengharapkan, SMP Negeri 1 Mundu dapat menampung semua siswa yg mendaftar agar program wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Mundu dapat terwujud,” jelas Siska.

Program wajib belajar 12 tahun merupakan amanat undang-undang. Namun belum semua orang tua sadar dan peduli sehingga perlu ada kepedulian dari pemerintah dan lembaga



pendidikan.

Pentingnya kerjasama antara lembaga pendidikan dengan pemerintah desa untuk meningkatkan indeks pendidikan. Dia berharap desa dan kecamatan turut memastikan siswa lulus SD dapat mengenyam pendidikan SMP.

“Kepala desa juga dapat membantu dengan melakukan pemetaan siswa SD di sekitar sekolah, sehingga sekolah dapat menampung semua pendaftar termasuk desa yang masuk *blind zone*,” tambah Siska.

Blind zone yang dimaksud

adalah, pendaftar yang merupakan siswa berdomisili di luar dari zona yang ditentukan.

Selain itu, tak kalah penting, pemerintah desa setempat dan pihak sekolah agar mendaftarkan rombel dan jumlah ruang belajar. Sehingga mampu menyesuaikan dengan kemampuan kapasitas sekolah.

Siska berharap, PPDB SMP di tahun 2023 akan berjalan dengan lancar dan sesuai jadwal yang ditentukan. Selain itu, dia juga mendorong sekolah dan pemerintah mengajak masyarakat untuk menyukseskan PPDB. •par

Wanawisata Ciwaringin Perlu Sentuhan Agar Dilirik Wisatawan

Keberadaan hutan kayu putih di bawah kaki Gunung Ciremai ini berpotensi menjadi wisata indah. Hanya perlu sentuhan dan perhatian. Seperti apa?



Foto-foto: Soy/Mir/ck

Keindahan alam dibalut dengan rindangnya pepohonan menjadi pemandangan saat berkunjung ke tempat satu ini. Keindahan alam dengan *view* Gunung Ciremai bersanding dengan suburnya pohon-pohon. Tak pelak, kawasan ini akan menyejukkan hati para pengunjung. Terutama bagi yang ingin sekadar melepas penat.

Adalah Wanawisata Ciwaringin, sebuah wisata alam buatan di Desa Ciwaringin, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon. Di tempat tersebut, wisatawan bisa berjalan kaki sambil menikmati pemandangan yang mengitari seluruh kawasan.

Wanawisata Ciwaringin memiliki kawasan hutan yang dipenuhi dengan pohon kayu putih. Pohon ini

memiliki batang yang tidak terlalu besar, serta daun unik yang berbentuk bulan sabit. Kayu putih terkenal sejak dulu sebagai salah satu tanaman obat, dan menjadi bahan baku pembuatan minyak kayu putih.

Untuk sampai di wahana rekreasi ini cukup mudah. Para wisatawan harus menuju Jalan Raya Bandung – Cirebon yang berjarak 27 km dari pusat Kota Cirebon hingga masuk di Desa Ciwaringin.

Tidak hanya bisa menjelajahi rimbunnya tangkal-tangkal kayu putih, wisatawan juga dapat bermukim dan bermalam di antara pepohonan yang menenangkan.

Bagi para pengunjung yang memiliki hobi memancing, juga tak perlu khawatir, karena di sekitar



Wanawisata ini terdapat Danau Ciranca. Sebuah danau yang memiliki kontur berbatu dipenuhi pepohonan yang rindang di sekitarnya. Sangat tepat bagi pelancong yang hobi memepas. Setiap hari banyak pemancing yang berkumpul di tempat ini.

Wanawisata Ciwaringin dibuka setiap hari mulai pukul 08.00 hingga pukul 18.00 WIB.

Ada beberapa fasilitas dan

pelayanan saat berkunjung di lokasi ini, di antaranya area parkir kendaraan, musala, kamar mandi, toilet umum, outbond area, camping ground, spot memancing dan penginapan.

Keseruan lain yang dapat dilakukan di Wanawisata Ciwaringin ialah bermain motor cross. Untuk sebagian orang, kegiatan tersebut menyenangkan dan pastinya sangat seru. Permainan

an ini memang mampu memacu adrenalin. Kebutuhan di jalanan berpasir menjadi sebuah tantangan yang wajib dicoba.

Seperti diketahui, Wanawisata Ciwaringin terdapat sungai yang penuh semak belukar. Hal itu tidak terlepas sejarah awal mula lahirnya Desa Ciwaringin yang didirikan Tubagus Ismail Sakar Kedaton dengan Tubagus Duliman. Kedua kesatria itu adalah keturunan Kesultanan Cirebon.

Kedua kesatria itu datang ke hutan Gonggong untuk menjauhkan tekanan tekanan Pemerintah Kolonial Belanda. Saat itu Kesultanan Cirebon dipimpin Sultan Matangaji.

Mereka akhirnya membuka hutan dengan cara menebang pepohonan di sepanjang sungai Ciwaringin dan membuat pedukuhan tempat tinggal.

Tempat bersembunyi mereka tidak pernah diketahui oleh Belanda. Seiring waktu para penduduk pun menempati pedukuhan tersebut. Singkat cerita diberilah nama "Desa Ciwaringin" sesuai dengan nama sungai.

Saat ini, Ciwaringin tak hanya dikenal karena sejarahnya saat zaman penjajahan, namun tumbuh berbagai wisata. Dari keberadaan batik khas Ciwaringin sampai Wanawisata yang indah ini.

Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon terus mendorong Pemerintah Kabupaten Cirebon agr meningkatkan pariwisata sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DPRD Kabupaten Cirebon kini tengah membahas raperda terkait Rencana Induk Pariwisata Daerah (Riparda) sebagai payung hukum untuk memajukan pariwisata. • **Berbagai Sumber**

Pakusamben Didapuk Jadi Smart Village

Mendapat penghargaan desa cerdas dari Kemendes, karena keberhasilannya mengoptimalkan digitalisasi pelayanan. Bagaimana bisa?



Foto: Dok Pribadi

Sudah tiga tahun kiranya, Desa Pakusamben, Kecamatan Babakan, membangun pelayanan digital. Segala bentuk administrasi dan informasi desa, cukup menggunakan gawai dengan mengakses portal daring yang disediakan. Tak heran desa satu ini sempat menyandang sebagai salah satu dari 17 desa berpredikat *smart village* dari Kementerian Desa.

Anugerah tersebut, diperoleh karena kepiawaian para pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik yang mudah.

"Kami sempat memperoleh penghargaan itu. Karena ma-

syarakat merasa mudah dengan adanya website ini karena tidak harus mengantri di desa," ujar Arif Solihun, kuwu Desa Pakusamben.

Selain berfungsi sebagai infrastruktur pelayanan desa, di dalam *website* tersebut, terdapat informasi yang menyajikan transparansi desa. Para warga dapat melihat jumlah penduduk dan penggunaan dana desa hingga realisasinya. Sehingga masyarakat bisa mengetahui dan ikut mengawasi perkembangan setiap kebijakan program yang dikeluarkan desa.

"Karena desa juga harus mengi-

kuti perkembangan zaman yang menuntut agar semuanya bisa diakses secara daring," jelas Arif.

Uniknya, meski belum diresmikan secara resmi, keberadaan pelayanan digital ini sudah berjalan. Arif baru baru berencana akan *launching* portal daring desa beriringan dengan perayaan hari jadi Desa Pakusamben, pada September mendatang.

"Nanti sekalian kita sosialisasikan penggunaan *web* tersebut dan mengenalkan seluruh fitur yang ada di dalamnya. Dan itu akan kita lakukan di bulan September nanti," tuturnya.

Bagi Arif, predikat *smart village* harus benar-benar dibuktikan dengan terus mengoptimalkan pelayanan desa. Ia pun berharap langkah tersebut dapat menginspirasi bagi desa-desa lain di Kecamatan Babakan agar terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Beruntungnya, Desa Pakusamben terus didorong melakukan terobosan-terobosan yang baru, melalui pendampingan langsung dari Kementerian Desa bagi desa *smart village*.

"Kita berupaya agar selalu berinovasi. Tahun ini digitalisasi. Selanjutnya mungkin UMKM, Bumdes maupun terobosan lainnya. Semoga bisa terwujud," pungkasnya. •Soy

Kejiwan

Bakal Punya Mesin Pembakar Sampah

Demi mengurangi penumpukan sampah di TPA, Pemdes Kejiwan akan punya lahan khusus pembakaran sampah mesin. Dinas tidak perlu angkut lagi.

Sampah masih menempati persoalan yang selalu muncul di setiap daerah. Penyebabnya pun beragam: ketidakmampuan menyediakan TPS, maupun nihilnya pengolahan sejak tingkat desa. Akibatnya penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) pun tak terhindarkan.

Namun tak lama lagi Desa Kejiwan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon memiliki cara sendiri. Untuk mengurangi penumpukan *over load* TPA, salah satu program yang diinisiasi ialah dengan menyediakan tempat pembakaran sampah berkapasitas besar.

"Tempat sudah ada, sudah dibikin alasnya nunggu anggaran cair sama nunggu sawah panen baru kita mulai," ujar Kuwu Desa Kejiwan H Casto.

Casto menerangkan, dengan adanya tempat pembakaran sampah diharapkan persoalan sampah bisa selesai dalam sehari. Tidak akan lagi sampah menumpuk di TPS. Mereka mencanangkan lokasi tempat pembakaran sampah di lahan sawah milik desa.

"Kalau sekarang kita punya TPS di depan desa. Kita akan alihkan tempat sampahnya di tengah sawah. Lalu kita akan bakar sampai habis. Sehingga dinas tidak perlu angkut karena sudah dibakar sampahnya," terang Casto.



Foto: Rhyon

Meski telah memiliki bak sampah besar, kata Casto, permasalahan sampah belum dinilai selesai. Pengangkutan sampah dari TPS menuju TPA dianggap belum menyelesaikan sampah benar-benar bersih. Apalagi biaya pengangkutan sampah cukup besar, sehingga sebaiknya dibakar maupun dipilah di desa.

"Kita ada bak-bak sampah, tetapi kalau diangkut ya membutuhkan anggaran yang lumayan besar. Jadi lebih baik kita bakar habis saja," katanya.

Casto berharap, sampah yang

menumpuk di desa akan segera teratasi dengan kehadiran tempat pembakaran sampah. "Kalau saya berharapnya ke depan di desa, sampah dalam sehari bisa habis dengan dibakar. Semoga desa lain juga ikutan," harapnya.

Pemerintah Desa Kejiwan telah menyiapkan anggaran di tahun ini untuk membuat tempat pembakaran sampah.

"Kita sudah siapkan anggarannya. Nanti ada mesin cacah sampah besar yang akan kita beli. Semoga Desa Kejiwan bisa menginspirasi," paparnya. • Yan

Kalitengah

Komitmen Berdayakan Perajin Batik

Agar naik kelas jadi desa maju, Pemdes Kalitengah terus genjot industri batik desa. Bahkan bakal punya wisata batik khusus. Seperti apa?



Foto: MH/ck

Eksistensi Desa Kalitengah, Kecamatan TengahTani, sebagai desa embrio pembatik Cirebon tak banyak diketahui. Padahal jika ditelisik, Desa Kalitengah turut andil dalam kancah batik Cirebon. Tak sedikit merek batik ternama lahir dari desa tersebut.

Pemerintah Desa Kalitengah pun tengah berupaya mengorbitkan kembali nama Kalitengah sebagai desa pembatik.

Sejumlah wacana diakselera-

si demi mewujudkan rencana tersebut. Salah satunya melalui program pelatihan UMKM bagi pelaku bisnis batik.

Dengan melibatkan sejumlah instansi dan lembaga, Pemdes Kalitengah membina pelaku batik agar dapat memasarkan batik melalui digital *e-commerce*.

“Jadi biar pengrajin dapat mengatur dan menjual hasil produksi batik kepada konsumen tanpa melalui perantara lagi,” ujar Sekretaris Desa Kalitengah

Lukman.

Lukman mengungkapkan, selama ini para perajin menjual produk batik melalui pengepul karena kendala pemasaran. Karenanya, Pemdes Kalitengah berinisiatif membuat program tersebut.

Selain bertujuan membangun rantai produksi secara mandiri, langkah tersebut guna meningkatkan perekonomian warga sehingga menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Tentunya agar status Desa Kalitengah menjadi desa maju dapat terwujud.

Pemdes Kalitengah juga berencana membangun wisata industri batik bagi para wisatawan. Sehingga para pengunjung dapat melihat langsung proses pembuatan batik di desa sempat menyandang gelar kampung wirausaha.

“Kedepannya, pengrajin tidak hanya kita ajak untuk sekadar membatik, tapi juga mandiri dalam mengatur usaha,” ungkapnya.

Pemdes Kalitengah berkomitmen untuk terus memberikan mutu dan pelayanan bagi masyarakat dengan terus memberikan pendampingan terutama terhadap pelaku UMKM.

“Dengan begitu harapan angka kemiskinan dapat ditekan dan usaha menuju desa maju dapat segera tercapai,” kata Lukman. •Mir

Depok

Miliki Situs Keramat, Bersiap Jadi Wisata Religi

Melihat potensi keberadaan situs masjid keramat yang tak sepi peziarah, Pemdes Depok ingin ubah jadi desa wisata religi. Bagaimana langkahnya?

Desa Depok, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, ternyata memiliki peninggalan sejarah berupa masjid keramat. Masjid ini merupakan lambang desa yang hingga kini kelestariannya masih terjaga.

Kuwu Desa Depok Abdul Khalim berkeinginan membawa Desa Depok sebagai desa dengan kekayaan wisata religi. Bukan tanpa sebab, sebuah masjid tua telah berdiri di desa tersebut bernama Masjid Al Karomah.

“Tiap tahun kita bikin kegiatan untuk melestarikan masjid itu. Di antara agendanya ada mapag sri, haul, napak tilas masjid dan pengajian umum,” kata Khalim.

Khalim menerangkan, situs Masjid Keramat diakui telah berdiri sejak abad 14, beriringan dengan pembangunan Masjid Sang Cipta Rasa Kota Cirebon yang konon dibangun dalam waktu satu malam.

“Kalau literturnya memang belum pasti, tapi ini bareng berdirinya dengan Masjid Agung Sang Cipta Rasa,” terangnya.

Khalim meyakini keinginan membawa Desa Depok menjadi wisata religi akan tercapai. Melihat banyaknya makam dan situs keramat yang memikat wisatawan religi. “Di sini banyak makam keramat yang akan menjadikan wisata ini menjadi lebih istimewa nantinya,” ungkapnya.

Tak ayal, Pemdes Depok juga



Foto: Dok Pribadi

telah menggelontorkan biaya perawatan dalam setahun senilai dari Rp 6 juta.

“Selain dari desa, anggaran pemeliharaan juga ada dari Pemkab Cirebon. Tiap tahun kita ajukan untuk pemeliharaan masjid keramat itu. Kami juga akan memasang PJU agar pencahayaan lokasi makam bisa bagus,” tutur Khalim.

Walaupun belum dibuka secara resmi, diakui sudah banyak peziarah yang datang ke masjid meski hanya untuk beriktikak sebentar. “Setiap hari tidak pernah kosong, minimal satu rombongan itu ada. Jumlahnya 5 orang lah setiap hari selalu ada,” tambahnya.

Khalim berharap, dengan terwujudnya wisata religi, Desa Depok akan semakin dikenal masyarakat luar. Sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi warga sekitar masjid. “Kalau banyak wisatawan tentu ekonomi jalan. Pedagang di sekitar masjid akhirnya ramai, warga yang berdagang di sekitar masjid bisa merasakan dampak yang bagus,” ujarnya.

Ia pun meminta Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat mendukung langkah menuju desa wisata religi. “Kita juga berharap Pemkab bisa terus dukung desa-desa yang punya potensi bagus khususnya di desa kami,” pungkas Khalim. •Kus



Gambit Menteri

Dalam berbagai kesempatan sering saya mendapat pertanyaan: “Kang kapan Cirebon kuh bisa maju? Aja mengenen bae sih.” Saya melihatnya itu bukan pertanyaan biasa. Tapi, berupa curahan dari kedalaman hati, sekaligus juga tantangan.

Ya, tantangan. Seolah ia berkata: “Sebagai wakil rakyat, apa yang bisa dilakukan untuk Cirebon lebih baik?” Tentu saja ini hal yang positif. Sebagai pengingat dan pelecut kinerja. Saya berterimakasih untuknya.

Memang, berbagai indikator ekonomi menunjukkan bahwa Kabupaten Cirebon termasuk tertinggal, dibanding Kabupaten lain di Jawa Barat. Wajar jika warga merasakan ‘mengenen bae’.

Dalam kondisi tertinggal, tentu semaksimal mungkin harus membuat sebuah perencanaan dan aksi yang juga tidak *mengkonon-mengkonon bae*. Harus berbeda, inovatif, berani, dan komprehensif.

Pemerintah bersama DPRD Kabupaten Cirebon kini sedang menggodok Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW). Perda ini diharapkan menjadi pondasi pembangunan dan pengembangan Kabupaten Cirebon, baik secara tata ruang, tata wilayah, maupun tata kelola ke depan.

Hal penting yang harus diakomodasi dalam Perda ini adalah menjadi dasar pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu diharapkan menjadi solusi berbagai permasalahan lingkungan seperti pencemaran, banjir dan sampah.

Untuk itu kita perlu memainkan strategi yang ciamik agar tata ruang dan wilayah dapat mampu secara maksimal memompa segala potensi yang ada, baik potensi tanah, sumber daya alam, maupun sumber daya manusia.

Strategi yang dipilih harus agresif. Ibarat catur, pembukaan *gambit menteri* cocok untuk menggambarkan situasi ini. Strategi biasa, seperti *gambit raja* apalagi *pertahanan india* tentu kurang pas.

Gambit menteri sebenarnya bukanlah strategi

baru dalam dunia catur. Strategi ini sudah disebutkan dalam manuskrip Gottingen 1490. Pembukaan bidak di depan menteri ini kemudian populer setelah turnamen di Wina pada 1873.

Pembukaan ini dinilai agresif karena (1) dengan cepat para perwira bebas bergerak dan berdaya, dan (2) penguasaan area lebih luas dan maksimal. Syaratnya memang ada satu bidak di depan gajah (peluncur) dikorbankan.

Perwira bebas bergerak bisa menjadi simbol --dalam konteks penyusunan RTRW-- bahwa potensi SDM yang ada di Cirebon bisa diberdayakan secara maksimal, tumbuh dan berkembang berpartisipasi membangun. Sedangkan, penguasaan area dapat berarti ruang atau wilayah yang ada di Cirebon dapat produktif maksimal, area yang tadinya mati bisa menjadi hidup dan menghidupi.

Sementara bidak yang dikorbankan bisa diartikan harus ada sedikit ruang atau wilayah yang dikorbankan. Pengorbanan ini wajib menjadi pemantik hidupnya ruang yang lain. Pada akhirnya SDM dan SDA dapat maksimal diberdayakan.

Pada titik itu industri dan perdagangan akan tumbuh di semua sektor, terutama pariwisata, pertanian, kelautan, dan manufaktur. Ekonomi akan tumbuh, pengangguran terkikis, dan kesejahteraan meningkat.

Jadi jika nanti dalam Perda RTRW ada sedikit ruang yang ‘dikorbankan’ bukan berarti destruktif, tapi dalam kerangka tujuan besar tersebut. Jika nanti ada sedikit area pertanian atau pantai yang berubah peruntukkan, maka yakinlah itu demi kebaikan bersama.

Jika tidak ada kesadaran bersama dan dukungan semua elemen masyarakat maka sulit kita melakukan akselerasi. Jangan harap kita bisa melepaskan diri dari kemiskinan dan membengkaknya angka pengangguran, apalagi berharap mampu bersaing dengan kabupaten lain.

Pilihannya *gambit menteri*, atau *kaya kenen bae!*



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



Ayo Wujudkan **CIREBON BEBAS SAMPAH**

- ✓ Perda Khusus Pengelolaan Sampah
- ✓ Pembangunan TPA & TPS Desa
- ✓ Budaya Hidup Bersih



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



Ayo Dukung CIREBON BEBAS BANJIR

- ✓ Perda Khusus Penanganan Banjir
- ✓ Normalisasi Daerah Aliran Sungai
- ✓ Gerakan Masyarakat Sumur Resapan